

Jurnal Inen Paer

Pusat Studi Kebudayaan Universitas Nahdlatul Ulama NTB

Vol. 1, No. 2, Juni 2024

<https://unu-ntb.e-journal.id/jip>

ISSN: 3047-0463

TRANSFORMASI DMC *AWESOME* DARI ORGANISASI SOSIAL MENJADI GERAKAN AFILIASI POLITIK SEBAGAI MATA RANTAI EKUIVALENSI (Studi Gerakan Sosial di Kota Surakarta)

Rikmadenda Arya Mustika¹, Rezza Dian Akbar²
Universitas Sebelas Maret, Surakarta^{1,2}

E-mail Correspondent: rikmadendamustika@gmail.com

Abstrak

Studi ini meneliti tentang proses transformasi organisasi DMC sebagai gerakan sosial menjadi gerakan afiliasi politik di Kota Surakarta, Jawa Tengah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif-deskriptif melalui pendekatan *discourse theory* dalam konteks kota Surakarta pasca reformasi, serta strategi populisme politik DMC yang dibangun melalui pendekatan *political analysis*. Dengan menggunakan perspektif populisme Ernesto Laclau dan Chantal Mouffe sebagai pisau analisis diskursus politik, peneliti membaginya dalam beberapa sub analisis. Pertama, reformasi dan momen populis dimana munculnya DMC merupakan konsekuensi dari ketimpangan ekonomi dan kondisi struktur sosial di kota Surakarta pasca peristiwa Mei 1998. Kedua, periode transformatif bagi DMC dimana telah terjadi perubahan dalam perolehan modal dan mulai terjalannya afiliasi politik, terbangunnya afeksi politik dan peran pemimpin kharismatik, serta strategi membangun wacana organisasi sosial-kemasyarakatan. Ketiga, DMC sebagai gerakan sosial dan afiliasi politik dalam membangun mata rantai ekuivalensi. Kesimpulan dari penelitian ini adalah dengan strategi populisme politik, DMC dapat membangun formasi hegemonik yang selain dalam domain politik juga “kultural” melalui agenda sosial-kemasyarakatannya, hal ini sebagai peluang dalam merebut *common sense* dan potensi memenangkan *war of position* dalam setiap agenda politik di Kota Surakarta.

Kata Kunci: Gerakan Sosial, Afiliasi Politik, Populisme, Rantai Ekuivalensi

A. PENDAHULUAN

DMC Awesome merupakan organisasi yang mempunyai eksistensi dan basis massa yang besar di wilayah kota Surakarta, walaupun pada mulanya organisasi ini lebih dikenal atau identik dengan aktivitas premanismenya. Namun, berbeda dengan yang terjadi di masa lalu, berdasarkan informasi dari *Solopos.com* yang diakses pada 10 Oktober 2022, pukul 20.00 WIB, kini aktivitas dan kegiatan DMC lebih berfokus pada pelayanan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Bentuk kontribusi sosial seperti agenda donor darah massal, penyediaan mobil ambulans, pembentukan tim Rescue (*R-DMC*), dan berbagai agenda sosial-kemasyarakatan lainnya, merupakan aktivitas yang memiliki tujuan untuk menggeser opini publik tentang identitas ormas DMC dari yang dulu dan sekarang (Kurniawan, 2021).

Transformasi identitas yang terjadi pada ormas DMC menjadi fenomena yang cukup signifikan dalam dinamika perkembangan masyarakat dan gerakan sosial di perkotaan, khususnya dalam konteks kota Surakarta. Disisi lain, bersamaan dengan semakin berkembangnya jumlah basis massa, tidak dapat dipungkiri bahwa eksistensi ormas DMC juga turut mewarnai perkembangan dinamika perpolitikan di Kota Surakarta. Dalam buku *Dasar Hukum Pendirian Dan Pembubaran Ormas* (2011), walaupun segala aktivitas dan kegiatan ormas tidak berorientasi politik secara langsung (*politik mainstream*), namun setiap kegiatan dan programnya dapat berdampak secara politik (Nia, 2011).

Narasi identitas dan simbol-simbol seperti seorang figur kharismatik merupakan instrumen yang penting dalam politik, seringkali infrastruktur politik seperti partai politik mengkonsolidasikan beberapa tokoh ormas demi suatu kepentingan politik, begitu pula yang terjadi pada kepemimpinan ormas DMC yang berdasarkan informasi dari *Solopos.Com*, bahwa hasil dari musyawarah Pimpinan Anak Cabang (PAC) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Solo, melahirkan sosok atau figur baru dalam kepengurusan partai, salah satunya Giyatno (30), yang notabene adalah Ketua Harian ormas Pemuda DMC Awesome Surakarta (Kurniawan, 2021). Sebelumnya Ketua Umum DMC Solo Raya, Denny Nurcahyanto, S.E. atau yang akrab disapa Dencis dalam suatu wawancara dengan *TribunJateng.com* mendapatkan amanah sebagai Wakil Ketua

Bidang Maritim yang berada langsung di bawah Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah, Bambang Wuryanto atau akrab disapa Bambang Pacul (Faisal, 2019). Masuknya dua figur penting DMC dalam struktural partai adalah puncak dari proses transformasi DMC sejak awal pendiriannya pada periode setelah reformasi (2003), periode transformatif, hingga periode sosial-politik (DMC kontemporer).

Studi ini meneliti tentang organisasi Dewan Muda Complex's (DMC *Awesome*) sebagai salah satu organisasi kemasyarakatan (ormas), serta secara khususnya sebagai instrumen gerakan sosial di kota Surakarta. Studi ini menjadi penting dan signifikan secara sosiologis maupun ilmu politik dikarenakan sekurang-kurangnya terdapat 3 aspek, antara lain, pertama, studi ini menjelaskan bagaimana dinamika gerakan dan eksistensi DMC secara sistematis dan historis dari awal kelahirannya melalui pendekatan *discourse theory*, serta *political analysis* melalui strategi *populisme politik* ketika kini telah menjadi salah satu ormas dengan jumlah massa yang besar, dan memiliki daya tawar politis yang kuat di kota Surakarta.

Kedua, studi ini menjelaskan transformasi DMC dalam konteks sosio-kultural (dari masyarakat berkarakter preman) menjadi organisasi kemasyarakatan (ormas) yang juga mempunyai implikasi politis bagi eksistensinya, terutama menjadi potensi basis atau konstituen dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Selanjutnya, studi ini akan memberikan analisis bagaimana DMC membangun strategi populisme politik-nya dalam membentuk mata rantai ekuivalensi (*chain of equivalence*), serta bagaimana formasi hegemonik baru yang coba dibangun melalui poin sentral (*nodal point*) yang menjadi hasil dari proses artikulasi wacana dalam dinamika DMC kontemporer.

B. METODE PENELITIAN

Dalam artikel ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menyajikan data secara deskriptif dinamika organisasi DMC *Awesome* dari awal kelahirannya hingga sekarang (periode formatif, pengukuhan, transformatif, hingga sosial-politik). Kemunculan DMC sebagai gerakan sosial akan dijelaskan dalam pendekatan *discourse theory* dimana akan diperoleh pemaknaan subjek dalam diskursus yang sedang berkembang (hegemonik) serta

konteks kesejarahannya. Oleh karena itu, peneliti melakukan observasi partisipatoris selama 3 (tiga) bulan di kelurahan Nusukan (Solo Utara) yang menjadi *lokus* atau basis dari DMC Awesome. Selain itu, perlu dilakukan wawancara secara mendalam kepada informan, seperti para pendiri (*founding father*) sebagai figur senior DMC yakni Denny Nurcahyanto S.E, Binar Ariyanti S.T, dan Joko Santoso, lalu figur sentral yakni pimpinan DMC Giyatno A.Md, serta para anggota yang tergabung dalam DMC untuk menjelaskan secara historis kemunculan DMC serta proses transformasinya menjadi gerakan afiliasi partai politik dalam bingkai *political analysis*. Sebagai metode tambahan, akan dilakukan juga pencarian data pendukung melalui dokumentasi sumber-sumber sejarah DMC seperti AD-ART Organisasi dan Pedoman Organisasi (PO), maupun kajian literasi yang relevan dengan topik penelitian. Data-data yang terkumpul kemudian akan dianalisis menggunakan teori populisme Ernesto Laclau dan Chantal Mouffe, yang mana kemunculan gerakan DMC kontemporer merupakan hasil dari pengejawantahan antara produksi wacana dan analisa politik.

Discourse Theory Approach

Wacana atau *discourse* sendiri merupakan konstruksi sosial dan politik yang membentuk suatu sistem dari hubungan antara objek dan praktik sosialnya, agar posisi dari subjek beserta agen sosial dapat diidentifikasi. Suatu agenda politik akan berupaya untuk merangkai perbedaan melalui wacana, dalam rangka mendominasi atau mengorganisasi setiap area “pemaknaan” dan juga sebagai fiksasi atas identitas objek dan praktiknya dengan cara tertentu. Pendekatan wacana berusaha menginvestigasi bagaimana praktik sosial di artikulasikan dan kontestasi dari wacana membentuk realitas sosial. Wacana merujuk pada sistem pemaknaan praktik-praktik yang membentuk identitas subjek maupun objek. Discourse atau wacana bersifat kontingen dan terkontruksi secara historis, karenanya wacana dapat diproduksi oleh kekuatan politik dan menimbulkan efek dislokasi di luar kontrol (Howarth,dkk; 2-4).

Strategi Populisme: *Political Analysis*

Dalam *On the Populist Reason* (2005), Laclau berargumen bahwa fenomena populisme bukanlah memahami suatu jenis gerakan yang dapat

diidentifikasi dengan basis sosial tertentu atau orientasi ideologis tertentu, tetapi sebuah logika politik (*political logic*). logika politik terkait dengan institusi sosial yang muncul dari tuntutan sosial (*social demand*) serta melekat pada setiap proses perubahan sosial. Perubahan ini, seperti yang juga kita ketahui, terjadi melalui artikulasi variabel persamaan dan perbedaan, dan momen ekuivalen mengandaikan konstitusi dari subjek politik global yang menyatukan pluralitas tuntutan sosial (Laclau,2005;117). Penelitian ini menggunakan strategi populisme untuk melihat transformasi DMC (sebagai hasil dari tuntutan sosial) dengan logika politik yang dibangun melalui modal (*capital*), afiliasi politik, figur kharismatik, dan pemaknaan (*nodal point*).

C. PEMBAHASAN

1. Reformasi dan Momen Populisme DMC (*Discourse Theory*)

- a. Peristiwa Mei 1998 dan Munculnya Ketimpangan Sosial-Ekonomi di Kota Surakarta.

Kejatuhan Soeharto sedikit membawa angin segar bagi demokrasi di Indonesia, namun serangkaian peristiwa menjelang reformasi sangat berdampak bagi kondisi ekonomi dan sosial masyarakat, khususnya di kota Solo yang pernah menjadi pusat gerakan massa pada peristiwa Mei 1998. Reaksi yang muncul dari momen reformasi tidak bisa dipisahkan dari ‘trauma’ massa dari krisis yang terjadi di tahun-tahun sebelumnya, sehingga tidak sulit untuk memicu gelombang amarah dan protes pada peristiwa tersebut. Berdasarkan informasi dari *P2k.Stekom.ac.id* pada Jumat (23/06/2023), pukul 15.34 WIB , sejumlah aksi dan kerusuhan hampir merata di seluruh penjuru kota Surakarta pada tanggal 14-15 Mei 1998, peristiwa itu membuat kota Solo lumpuh dalam beberapa hari. Berbagai tindakan pengrusakan, pembakaran fasilitas publik dan swasta, hingga penjarahan seperti di Jalan Slamet Riyadi yang menyasar pertokoan seperti *Matahari Beteng* ,*Toko Sami Luwes*, *Wisma Lippo Bank*. Selain itu pembakaran Supermarket *Matahari Super Ekonomi* (SE), serta Cabang Pembantu (Capem) *Bank BCA* di Purwosari, dan di tempat lain seperti Nusukan, Gading, Tipes, Jebres serta hampir di seluruh wilayah Solo terjadi peristiwa serupa. Di Solo

Utara massa aksi membakar fasilitas dan bus di Terminal Tirtonadi, di Solo bagian barat massa merusak Kantor Samsat Jajar, Plasa Singosaren, Monza Dept Store, toko sepatu Bata, serta di wilayah selatan Bank Putra dibakar, pun wilayah timur juga tak luput dari aksi serupa. Selain itu, secara ekonomi dampak yang ditimbulkan dari peristiwa Mei 1998 di Solo mengakibatkan sekitar 50.000 sampai 70.000 tenaga kerja produktif di Solo menganggur karena kehilangan pekerjaan dari banyaknya toko, swalayan, dan berbagai tempat usaha yang dibakar (lebih dari 500 buah). Menurut informasi dari Akuntan Publik Drs Rachmad Wahyudi Ak MBA, nilai total kerugian fisik di Solo ditaksir mencapai Rp 457,5 miliar. Akibat banyaknya pengangguran, meningkatnya jumlah masyarakat miskin kota, serta munculnya berbagai kejahatan jalanan atau *gangster* adalah persoalan sosiologis di kota Surakarta pasca kerusuhan Mei 1998 (Anonim, 2023).

b. Karakteristik Gerakan Sosial-Politik di Surakarta.

Secara historis, dinamika gerakan sosial-politik di kota Surakarta direpresentasikan oleh kelompok *Abangan*¹. Eksistensi dari kelompok ini sudah ada sejak awal abad ke-20 yang secara historis diwarnai dengan berbagai macam konflik dan gerakan sosial yang berujung tindak kekerasan seperti kerusuhan anti-etnis Cina, revolusi sosial antiswapraja, hingga konflik antar pendukung partai politik². Walaupun secara historis terjadi transformasi ideologi dalam gerakan sosial-politik di Solo, namun menariknya bahwa karakteristik masyarakat Solo tetaplah sama sejak awal abad 20, yakni *abangan* yang cenderung ‘reaksioner’ dalam memandang perubahan di masyarakat. Seperti pada penelitian Yudi Setianto (2022) dalam melihat dinamika transformasi golongan *abangan*, yang menjelaskan bahwa pada era reformasi terjadi akumulasi reaksi dalam bentuk euforia besar-besaran dalam merayakan kebebasan dari tekanan orde baru, aktivitas seperti konvoi motor di jalanan, mabuk-mabukan di jalan, hingga

¹ Kelompok abangan merepresentasikan kelompok masyarakat yang berdasarkan tipologi Clifford Geertz (1983) merujuk pada golongan sosial yang bukan muslim; ataupun muslim yang tidak mempraktekkan ajaran islam; ataupun juga muslim yang mempraktekkan ajara islam secara sinkretis dengan kepercayaan lokal, seperti kejawen atau kebatinan.

² Fahrizal, Adif. 2020. Islamisasi di Kota Surakarta dan Sekitarnya Masa Orde Baru: Sebuah Tinjauan Awal. Jurnal Lembaran Sejarah Volume 16 Number 1, April 2020. Yogyakarta: UGM

mengganggu ketertiban umum. Di era ini tindakan kriminalitas mulai meningkat tajam (Yudi,2022). Sebagian besar reaksi yang muncul pada era ini diwarnai dengan aktivitas kelompok abangan di berbagai wilayah kota Surakarta.

- c. Aktivitas Premanisme di Solo Utara dan kelahiran DMC sebagai gerakan sosial.

Budaya premanisme di Solo pada faktanya sudah ada sebelum era reformasi, sebagai contoh lahirnya kelompok *Gang* besar *Gondhez* (GDZ's)³ pada tahun 1982. Wilayah Solo Utara (Nusukan) yang identik dengan aktivitas premanismenya disebabkan karena tingginya tensitas perkelahian jalanan atau tawuran diantara para pemuda yang cukup lazim pada periode tersebut. Seperti apa yang dipaparkan oleh Joko Santoso (57) dan Binar Ariyanti (38) selaku pendiri DMC, bahwa kebiasaan berkelahi atau *gelut*, dan tawuran dikalangan pemuda Nusukan adalah lanskap sosio-kultural pada tahun-tahun sebelum didirikannya Paguyuban DMC secara resmi (2000-2003).

“Kenapa paguyuban ini kita namakan DMC, karena dulu di Distrikan, Minapadi, Cangakan itu embrionya preman disitu, menurut masyarakat. Tujuan kami dulu mendirikan DMC adalah karena sering terjadi tawuran antar kampung, sehingga sebagai cara kami untuk menyatukan masyarakat, khususnya pemudanya kemudian kami organisirlah mereka di DMC, dan ternyata bisa bersatu dengan baik hingga sekarang sampai se-Solo Raya” (Joko, 2023).

“Sebelum resmi jadi ormas atau masih dalam bentuk paguyuban, tujuan kita ya untuk mewedahi kepentingan anak-anak muda dari berbagai kampung, dulu sering gelut atau berkelahi antar kampung, nah dengan adanya DMC ini dapat mewedahi kepentingan itu, biar gak ada ‘gap’ antar pemuda dan mencegah konflik antar kampung. Dan terbukti setelah hadirnya DMC, pemuda dari berbagai kampung ini bergabung

³ Berdasarkan penelitian dari Rini Setiyowati (2008), *Gondhez* atau *GDZ's* sendiri merupakan organisasi yang berdiri pada pertengahan Bulan Juli tahun 1982 dan terkenal dengan aktivitas premanismenya di Solo Raya. Organisasi ini dipimpin oleh seseorang bernama *Nunggal* yang dilatarbelakangi oleh kebiasaan berkumpul dan nongkrong para anggotanya. Sama seperti organisasi “identitas” lainnya, terbentuknya *Gondhez* juga sebagai wadah eksistensi dan pencarian jati diri bagi anggotanya. *Gondhez* merupakan generasi yang muncul dari pengalamannya akibat hegemoni kekuasaan dalam struktur dan kondisi masyarakat yang sangat majemuk (Rini,2008).

dalam satu wadah dan gak ada lagi masalah pertikaian jalanan”(Binar,2023).

Selaras dengan itu, menurut pemaparan Denny Nur Cahyanto S.E, atau akrab disapa *Dencis* selaku ketua umum DMC Awesome soal kondisi masyarakat Nusukan (Solo Utara) serta alasan dibentuknya “Paguyuban” DMC bahwa:

“Masyarakat memang mengenal kita ini dimana-mana taunya cuma berkelahi, tawuran, gelut dan semacamnya, tapi dulu ketika saya membangun DMC dengan temen-temen ini tujuan sebenarnya ya untuk berkontribusi sosial di lingkungan sekitar. Di DMC kita bersatu, bersama-sama nyengkuyung dalam membantu masyarakat di Solo Utara (Nusukan). Terserah apa kata orang, tapi kita tetap pada pendirian utama, ikut serta dalam membangun masyarakat” (Denny,2023).

Paguyuban DMC yang lahir berdasarkan kondisi sosio-kultural masyarakat Solo Utara memiliki karakteristik yang sama dengan kelompok-kelompok *abangan* yang memiliki sejarah panjang dalam gerakan sosial-politik di kota Surakarta. Menurut konsepsi Marx dalam *Manifesto Communist* (1848) menyebut golongan ini sebagai “lumpen proletariat” yang bersifat reaksioner, konservatif, dan berbahaya dalam perjuangan kelas karena mereka mudah disuap dan menyatu dengan kepentingan klas kapitalis⁴. Klas (kelompok) lumpen proletariat tidak bisa atau tidak selalu melekat dalam subjektivitas masyarakat miskin kota. Klas ini dianggap problematik karena selama ini selalu melekat sebagai kelompok yang sekaligus punya orientasi politik yang khas. Klas ini merupakan bentuk subjektivitas politik, artinya terbentuk karena konfigurasi politik tertentu, maka dapat menjadi motor dari berbagai macam gerakan kelas (*multiclass movement*). Faktanya yang terjadi di Indonesia, justru banyak kaum miskin kota yang terserap dalam praktik politik yang reaksioner dan konservatif seperti pada aktivitas mobilisasi kelompok-kelompok kekerasan (Mughis,2021).

Dinamika perkembangan paguyuban DMC yang nampak berdasarkan karakter-karakter ‘lumpen proletariat’ atau ‘abangan’ mengalami transformasi dari yang sebelumnya hanyalah hasil mobilisasi kelompok-kelompok *vigilantism* di Solo Utara menjadi organisasi sosial-kemasyarakatan. Ada prasyarat penting

⁴ Marx, Karl. 1884. *Manifesto Of the Communist Party*.

dalam proses transformasi ini, berdasarkan *discourse theory*, peneliti membaginya melalui:

2. Wacana Ketimpangan Sosial-ekonomi: Lahirnya Tuntutan Sosial (*social demand/popular demand*).

Populisme menurut Laclau dalam analisisnya sebagai *political logic* yakni sebuah konsekuensi dari kondisi politik yang terjadi di masyarakat; *naming and effect* artinya definisi ‘populis’ akan memberikan konsekuensi khusus dalam menentukan kategori tujuan yakni yang utamanya adalah berorientasi pada rakyat (*the people*) atau disisi lain yang berorientasi pada permintaan sosial tertentu (*particular demand*) yang timbul dari ketidakpuasan masyarakat terhadap kondisi sosial-ekonominya (Mustofa,2019). Lahirnya Paguyuban Distrikan Minapadi Cangakan “DMC” yang merupakan anak kandung dari “momen” reformasi ini muncul dari ekspresi massa sebagai *partikular demand* sebagai wacana yang berkembang dalam konteks ketimpangan sosial-ekonomi pasca terjadinya kerusuhan Mei 1998.

Pada periode setelahnya, proses pembangunan kembali atau reformasi (politik dan birokrasi) tak turut menjawab tuntutan objektif rakyat, yakni soal penyediaan pekerjaan yang layak. Dan tentu saja munculnya premanisme adalah implikasi logis dari keadaan ini. Hadirnya DMC dapat menyediakan “makna” di kala muncul ketidakpuasan masyarakat akibat dampak peristiwa Mei 1998, khususnya terkait permintaan sosial (*social demand*) akan pekerjaan. Hal itu selaras dengan yang dipaparkan oleh Giyatno (32) selaku Ketua Harian DMC, bahwa sejak didirikannya DMC dalam model paguyuban, tujuannya adalah untuk mengakomodir para pekerja serabutan (*Freelance*) sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya.

“Dulu setau saya waktu masih SMP, latar belakang didirikanya organisasi ini adalah untuk mengakomodir para pekerja serabutan atau freelance bahasanya, karena terkait dengan pendapatan ekonomi jadi diberikan sebuah wadah paguyuban. Hal ini atas anjuran beliau-beliau (tokoh senior DMC) dan para pengurus agar masyarakat dapat menjalin kerukunan lewat DMC. Beliau para senior bermaksud untuk membuat

wadah yang menyatukan masyarakat serta bergerak bersama melalui paguyuban DMC” (Giyatno, 2022).

Hal ini seperti yang Laclau katakan soal *discourse*, atau wacana yang hadir akan berusaha mengkonstruksi masyarakat (*society*) yang memiliki keragaman partikular, suatu usaha untuk mendefinisikan dan menyeragamkan partikularitas inilah yang menjadi cikal bakal penciptaan identitas kolektif dan kepentingan bersama (Theofillus,2017). Berdasarkan masifnya kebutuhan akan pekerjaan karena kondisi ekonomi masyarakat Solo yang belum pulih, DMC hadir sebagai kelompok identitas yang mampu mengartikulasikan *tuntutan* massa (dalam wacana ketimpangan sosial-ekonomi) melalui praktik-praktik penyediaan lapangan kerja. Seperti apa yang dikatakan Joko Santoso soal income dari paguyuban DMC.

“Income DMC dulu salah satunya berasal dari perpajakan yang isinya anggota kami, terlebih yang belum memiliki pekerjaan, jadi para anggota sekaligus kami berdayakan melalui parkiran secara resmi”(Joko,2023).

Selain itu, berdasarkan AD-ART (Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga) Paguyuban DMC Tahun 2007, Pasal 5 terkait “Kekayaan dan Pendapatan” Paguyuban DMC diperoleh dari:

- a) Uang pangkal dari para pendiri
- b) Pendapatan usaha
- c) Sumbangan pihak ketiga dan/atau donatur
- d) Pendapatan lain yang sah dan tidak menyimpang dari ketentuan Anggaran Dasar.

Selaras dengan yang Laclau bilang bahwa suatu tindakan, praktik, maupun pernyataan akan direproduksi dalam suatu wacana sekaligus mereproduksi wacana tersebut (Theofillus,2017). DMC sebagai gerakan sosial mampu mereproduksi wacana baru melalui instrumen “paguyuban” dalam menyediakan “alternatif” bagi masalah sosial-ekonomi masyarakat di Solo Utara. Hal ini khususnya terkait penyediaan pekerjaan, walaupun dalam keberjalanannya masih

identik dengan aktivitas premanisme. Tuntutan (*demand*) menjadi ciri pertama dari populisme, dimana artikulasi dari tuntutan akan bertransformasi menjadi *claim* atau menuntut penjelasan (*demanding an explanation*) (Laclau,2005;72-74).

Penamaan DMC yang pada awalnya sekedar organisasi yang bersifat lokal kedaerahan (Distrikan, Minapadi, Cangakan) pada perkembangannya berubah menjadi DMC Solo Utara, lalu DMC Awesome Solo Raya. Hal ini untuk mengikuti bertambah pesatnya keanggotaan organisasi di luar batas-batas kedaerahan, sehingga pentingnya penamaan agar cakupan DMC menjadi lebih luas lagi, dan membedakan “diri” dengan organisasi lain, khususnya dengan organisasi yang basis massanya mempunyai karakteristik yang hampir sama, seperti Gondhez (GDZ’s), Serduloseto (SS), WAM, LUIS, dsb. Disinilah embrio awal bagi kemunculan politik populisme DMC.

3. Membangun Modal Sosial (*social capital*)

Selain dalam bentuk materiil modal juga diartikan sebagai energi sosial, hanya berada di dalam arena *discourse* (wacana) dimana terjadi proses produksi atau mereproduksi. Jika dilihat dengan seksama terbentuknya DMC ini pada awalnya adalah kristalisasi dari proses konsolidasi kelas menengah dan tokoh lokal di Solo Utara (Nusukan), bukan murni dari kalangan menengah ke bawah. Berdasarkan pemaparan Binar Ariyanti, DMC ini bukan hanya wadah komunikasi antar pemuda, tetapi juga para tokoh dan senior di Kelurahan Nusukan.

“DMC ini juga turut membantu menjembatani antara tokoh senior khususnya di kelurahan nusukan agar komunikasi tidak terputus. Kala itu DMC juga tidak cuma untuk pemuda-pemuda, tapi juga ada tokoh-tokoh senior dari Nusukan” (Binar,2023).

Munculnya DMC merupakan “bangunan” yang terbentuk atas relasi dari pihak-pihak yang memiliki kedudukan sosial di Solo Utara, seperti para tokoh lokal, anggota partai, dan elemen masyarakat kelas menengah⁵. Seperti yang

⁵ Dalam penelitian Aldwin Surya (2006) terbentuknya kelas menengah dapat terjadi karena perbedaan kemampuan akses secara ekonomi dan politik, Kelas menengah politik adalah

dipaparkan Giyatno, ke 7(tujuh) pendiri DMC merupakan tokoh-tokoh yang cukup dikenal di lingkungan kelurahan Nusukan.

“Dulu DMC didirikan oleh para senior, seperti yang kita tahu ada om Denny Nurcahyanto atau yang akrab dipanggil Denciz, lalu ada pak Hasto Budiarto, mba Binar Ariyanti, Pak Joko Santoso atau Joko Lintrik, om Jony Sofyan, mas Nono Harjanto dan mas Dicky Murwansyah” (Giyatno,2022).

Modal awal DMC untuk melegitimasi eksistensi kelompoknya di wilayah Nusukan adalah dengan merangkul beberapa tokoh setempat, hal ini selaras dengan konsep Modal Sosial (*Social Capital*) Bourdieu yakni “modal” baik dalam bentuk jaringan sosial atau basis sosial sebagai sumber daya yang potensial dalam melegitimasi kekuasaan. Menurut Bourdieu, modal sosial (*Social-Capital*) dapat termanifestasikan melalui hubungan-hubungan dan jaringan hubungan-hubungan sebagai sumber daya yang berguna dalam penentuan dan reproduksi kedudukan-kedudukan sosial. Binar Ariyanti menjelaskan pentingnya kedudukan tokoh lokal pada awalnya adalah sebagai mediator dari keadaan Nusukan yang sangat *chaos* dan memfasilitasi proses-proses konsolidasi DMC di masa awal pendiriannya.

“Kalo paguyubannya dulu sejak tahun 2002 tanggal 27 agustus di tempatnya pak Joko Lelono sebagai salah satu tokoh yang memfasilitasi tempat untuk komunikasi dan mediasi antar kampung dalam pembentukan DMC” (Binar,2023).

Hadirnya DMC sebagai gerakan sosial di Solo Utara adalah wujud paripurna dari cita-cita mobilitas masyarakat lewat aksinya dalam menyediakan akses pekerjaan serta kontribusi sosialnya di masyarakat. Wacana mengenai ketimpangan sosial-ekonomi dan minimnya lapangan kerja yang selama ini menjadi angan-angan sosial atau penanda mengambang (*floating signifier*) mampu ditangkap dan dinarasikan dengan baik oleh para *founding father* dalam mendirikan paguyuban DMC. Hal ini seperti yang laclau bilang bahwa hadirnya

kelompok tengah masyarakat yang terbangun kebolehan politiknya bukan karena modal atau profesionalisme, melainkan karena intelektualitas atau organisasi. Mereka antara lain berasal dari kalangan intelektual-tenaga akademik-mahasiswa, pengurus organisasi sosial politik, jurnalis dan kalangan politikus. Sedangkan Kelas menengah ekonomi adalah kelompok tengah masyarakat yang berasal dari kalangan pengusaha, profesional, dan investor (Surya,2006)

gerakan populisme merujuk pada Margaret Canovan⁶ bahwa alasan kita harus menyebut gerakan itu sebagai 'populis' adalah bukan hanya pada basis sosialnya (contoh: sektor agraria) tetapi pada infleksi dari basis tersebut. Sebagai *Political logic* - logika politik yang hadir dalam gerakan-gerakan sosial yang cukup heterogen. Dalam analisisnya, Canovan berada di ambang batas menghubungkan kekhususan populisme dengan logika politik yang mampu mengorganisir sosial daripada konten itu sendiri. Dengan demikian, dia menegaskan bahwa dua fitur yang secara universal hadir dalam populisme adalah daya tarik bagi rakyat dan anti-elitisme⁷ (Laclau,2005;7).

DMC sendiri merupakan gerakan populis yang membangun daya tarik bagi massa, terkhusus pada konteks sosial-ekonomi kala itu. Selain itu, karakter basis sosial masyarakat Surakarta yang “abangan”, “lumpen”, “vigilantism” ataupun “premanisme” sesungguhnya sangat mempengaruhi eksistensi DMC selain karena logika kesejarahannya, tetapi juga afeksi yang dibangun oleh pemimpin atau otoritas tradisional dengan anggota serta masyarakat sekitarnya. Disinilah letak perbedaan penelitian ini dengan pandangan Laclau, dimana dalam penelitian ini akan terjadi perkawinan antara gerakan sosial sebagai konsekuensi dari tuntutan sosial dan juga signifikansinya dalam diskursus ekonomi-politik (objektivitas), serta karakter basis sosial yang kemudian mampu membawa DMC menjadi gerakan afiliasi politik (subjektivitas).

4. Periode Transformatif (Populisme sebagai *Political Analysis*)

a. Perubahan dalam perolehan Modal (*Capital*) dan Afiliasi Politik

Dalam periode transformatif, fokus DMC dalam memproduksi modal bagi aktivitasnya berkaitan erat dengan proses transformasi karakter kulturalnya. Disinilah pentingnya membangun paradigma baru melalui simbol-simbol yang lebih humanis. Hal ini seperti yang dipaparkan oleh Denciz dan Binar Ariyanti, terkait efektivitas penggunaan nama “DMC” yang secara historis sudah sangat melegenda dan populer di masyarakat. Logo maupun tulisan-tulisan “DMC”

⁶ Margaret Canovan, *Populism*, London, Junction Books, 1981.

⁷ *Ibid.*, p. 294

sudah tersebar luas di setiap wilayah di Surakarta baik dalam aktivitasnya maupun dalam bentuk tulisan-tulisan dinding. Hal ini selaras dengan pandangan filosofis dari logo ‘tangan memegang rantai’ yang menurut Denciz sendiri adalah simbol dari “mempersatukan perbedaan diantara masyarakat”

“Kalo logo DMC itu ada artinya, itukan keliatan agak serem dengan gambar tangan yang mengepal rantai besi. Tangan disitu artinya organisasi kita sebagai wadah yang memegang komitmen untuk terus berkontribusi sosial, nah sedangkan rantai besi itu masyarakat yang terdiri dari elemen yang berbeda, kepentingan berbeda, kelas sosial yang berbeda, namun menjadi satu dalam genggamannya organisasi”(Denny, 2023).

Mengutip pendapat Bourdieu (1977) bahwa modal simbolik menjadi daya tawar bagi pembentukan relasi sosial “modal sosial” dengan menarik orang kaya yang bukan hanya karena “biaya” tetapi juga untuk memberikan kontribusi terbesar untuk pemeliharaan orang miskin, penginapan orang asing, dan organisasi festival (Bourdieu,1977;180). Eksistensi dari logo maupun nama DMC yang sudah terkenal menjadi modal simbolik bagi perkembangan organisasi ini, namun tanpa adanya perolehan kedudukan atas relasi atau jaringan-jaringan yang terbangun (*social-capital*) di DMC sejak awal pendiriannya, maka akan sulit untuk mendapatkan modal baik secara ekonomi, kultural maupun simbolik. Dalam konteks transformasi sosio-kultural DMC, peran logo sebagai modal ‘simbolik’ dalam merekonstruksi citra DMC sebagai organisasi yang bersifat sosial-humanis.

Selain menjadi modal secara “simbolik”, logo DMC adalah sarana representasi identitas atau penanda (*signifier*) yang berperan cukup signifikan dalam transformasi DMC dan membangun wacana sebagai ormas yang sosial-humanis. Seperti apa yang Laclau katakan, dalam suatu diskursif, penanda (*Signifier*) berfungsi sebagai “penyatuan” dan untuk membedakan dengan yang lain (*logic of difference*). Sebagai contoh logo DMC dalam pamflet agenda sholat akan mengkaburkan batas-batas perbedaan objektif pada masyarakat, namun menyatukannya sebagai agenda “bersholawat”, inilah yang kemudian Laclau sebut sebagai *logic of equivalent*. Melalui simbolisasi atau pembahasan,

proses transformasi DMC yang membawa wacana baru sebagai ormas akan nampak lebih populis, apalagi jika berdampingan dengan kelompok lain yang secara historis berbeda dalam hal “kultural”-nya, seperti kelompok jamaah masjid atau santri.

Pendirian DMC pada awalnya adalah mewadahi berbagai kepentingan akibat kondisi sosio-kultural (premanisme) dan ekonomi (kemiskinan dan pengangguran) masyarakat di Solo Utara. Namun karena perkembangan jumlah massa DMC yang kian hari makin signifikan, maka organisasi ini memiliki *bargaining position* secara politis, khususnya bagi para figur-figur DMC. Menurut Giyatno, banyak para anggota DMC yang masuk ke partai politik maupun mencalonkan diri sebagai anggota legislatif.

“Dulu setau saya DMC tidak menekankan anggotanya ke partai tertentu, dulu banyak anggota yang nyaleg ke berbagai partai, bahkan dulu ada yang masuk partai Nasdem, Hanura, Gerindra, dan PKB juga ada. Namun memang seiring berjalannya waktu, dari kita cukup banyak yang ke PDIP. Banyak anggota DMC yang berkecimpung di politik praktis, tidak hanya yang senior-senior tapi juga yang muda-muda juga tidak hanya di PDIP. Seperti mas Wisnu itu di PKB, mas Yonatan di Nasdem lalu juga pernah ke Perindo, pernah ada juga yang ke Hanura” (Giyatno,2022).

Pada periode transformatif ini, figur-figur DMC sudah mulai tampak memasuki dunia politik formal atau bergabung ke partai politik tertentu, namun tidak bisa dipungkiri bahwa sebagian besar massa lebih memilih menjadi anggota atau kader dalam Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Faktor yang melatarbelakangi kecenderungan tokoh-tokoh DMC ke PDIP adalah adanya kesamaan karakteristik basis massanya yakni kelompok *abangan*. Hal ini secara jelas dipaparkan oleh Denciz bahwa ada faktor kesamaan terkait basis massa yang dimiliki oleh DMC maupun PDIP yakni masyarakat kelas menengah ke bawah.

“Kenapa pada akhirnya temen-temen milih PDIP?, ya karena secara latar belakang basis massa kita mirip, berasal dari kelas sosial menengah ke bawah” (Denny,2023).

Sebagai organisasi yang sejak awal memiliki karakteristik “preman”, DMC yang berasal dari masyarakat “abangan” kelas menengah ke bawah sesuai dengan basis massa utama dari PDIP yang juga umumnya berasal dari kelompok abangan yang secara sosial-politik punya sejarah cukup panjang di kota Solo. Bagi DMC, hal ini menjadi modal sosial (*social capital*) bagi keberjalanan DMC kedepan, dengan mendapatkan kanal (*channel*) serta jaringan politik untuk kemudian tidak hanya memberikan tameng atau sandaran terkait aktivitas mereka, namun juga memberikan legitimasi terhadap adanya transformasi bentuk dan karakter gerakan dari DMC yang dapat dipandang sebagai lebih dari sekedar organisasi preman.

b. Membangun afeksi politik melalui figur/kepemimpinan kharismatik

Pada periode awal kepemimpinan Giyatno, aktivitas dan pergerakan DMC mulai sedikit demi sedikit merambah ke dunia politik. DMC yang sudah memiliki basis massa signifikan adalah modal utama bagi para pimpinan maupun anggotanya dalam melakukan manuver ke dunia politik, khususnya di wilayah kota Surakarta. Kepemimpinan kharismatik dari Giyatno menciptakan dorongan (afeksi) diantara para anggota DMC. Hal ini seperti yang dipaparkan ketua DMC “Junior” Arif Mudo Laksono (24) bahwa kepemimpinan kharismatik Giyatno dapat memotivasi para pemuda untuk terjun dalam keorganisasian.

“alhamdulillah setelah dipegang mas Giyat, kalau dulu saya mengibaratkan DMC kaya hewan buas di di dalam hutan yang gak ada aturan dan gak ada yang di takuti, rolling dan bentrok sama ormas lain tanpa diketahui ketua umum. Namun setelah mas Giyat ditunjuk menjadi ketua harian, kawan-kawan ada yang mengkoordinasi, dan saya secara pribadi termotivasi oleh kepemimpinan beliau. Temen-temen sudah terkomando dengan baik, sekarang fokus dengan kegiatan sosial seperti kita ikut donor darah rutin 3 bulan sekali, kita buat juga tim rescue DMC (R-DMC), atau biasanya pas puasa itu kita juga bagi-bagi sembako dan takjil di jalanan. Saya sendiri mencontoh dan mengagumi mas giyat, pemikiran dan wawasannya secara organisasi lebih luas. Jiwa pemimpin kharismatiknya mas Giyat sudah saya kenal sejak saya sekolah, beliau mudah merangkul kawan-kawan dari berbagai jenis golongan” (Arif,2023).

Pengaruh kepemimpinan kharismatik Giyatno (secara praktik dan retorik) seperti apa yang dikatakan Mouffe bahwa kehendak kolektif tidak dapat dibentuk tanpa beberapa bentuk kristalisasi atas afeksi bersama, dan ikatan afeksi dengan pemimpin karismatik memainkan peranan penting dalam proses ini. Selain itu, peranan pemimpin disini juga memiliki pengaruh sebagai *primus inter pares* dan berguna dalam proses membangun relasi dengan yang berbeda (Mouffe,2018;85-86). Ikatan afeksi yang dibangun sejak lama oleh Giyatno dengan para anggota menciptakan kehendak bersama dalam membesarkan organisasi melalui agenda sosial-kemasyarakatan.

Masuknya Giyatno dalam struktural PDIP semakin memperkuat kedudukannya di dalam organisasi maupun masyarakat sekitar dengan program-program sosialnya. Hal inipun menjadi modal bagi Giyatno untuk berkarir di dunia politik formal. Selain Giyatno, dorongan politik juga tumbuh diantara anggota seperti halnya pada waka DPP Bidang Kepemudaan dan Olahraga, Arif Mudo laksono (24) yang juga siap untuk terjun dalam dunia politik.

“kalau itu saya sebagai anggota tentu manut dengan aturan ketua umum, mau ketua bilang ‘mengawal’ salah satu parpol ya kita harus siap. Saya secara pribadi jika ditunjuk untuk masuk ke politik atau partai juga harus siap”(Arif,2023).

Dorongan afeksi politik Giyatno mulai terbentuk setelah berada dalam lingkungan partai yang mana terdapat diskursus politik tertentu. Afeksi politik Giyatno sebagai hasil konstruksi wacana politik dalam ranah partai kemudian dibawanya dalam keorganisasian DMC, seperti dorongan politik yang timbul pada diri Arif. Afeksi ini dinarasikan oleh Giyatno melalui keinginannya dalam menjalankan kegiatan kemasyarakatan melalui instrumen partai. Proses menyebarnya afeksi ini seperti yang dikatakan oleh Brian Massumi dalam *Politics of Affect* (2015) dimana politik adalah pendekatan secara afektif, yakni seni memancarkan tanda-tanda dalam lingkungan afektif yang sama dan yang akan menentukan apa yang akan terjadi secara politis (Brian,2015;56). Seperti para pimpinan DMC yang memiliki kharisma sebagai individu yang mampu

mempengaruhi anggota dalam persepsi politiknya (*mikro perception*). Hal tersebut tentunya menjadi potensi politis, dimana anggota akan terdorong untuk terjun dalam arena politik praktis maupun hanya hadir sebagai konstituen. Disinilah mulai terciptanya wacana (secara mikro) untuk berafiliasi dengan partai politik.

Dalam konteks yang lebih luas, sebuah politik mikro (*micropolitics*) yang terbangun dan jika ditindaklanjuti secara kolektif serta dimanfaatkan, maka potensi tersebut dapat mengubah situasi. Politik mikro dan politik afektif mencari derajat keterbukaan dari situasi apa pun, dengan harapan untuk sebuah pencapaian yang berbeda. Hanya memodulasi suatu situasi dengan cara-cara yang memperkuat potensi yang sebelumnya tidak terasa ke titik persepsi (*nodal perception*) menjadi perubahan (Brian,2015;56-58). Secara organisatoris walaupun DMC tidak secara formal menjadi *underbow* partai politik tertentu, khususnya PDIP, namun afeksi anggota yang terakumulasi secara kolektif membuat DMC menjadi ormas yang ‘kelihatan’ lebih politis daripada sebelumnya. Hal ini tentunya bermanfaat bagi partai karena menjadi potensi ‘dukungan’ untuk mendulang suara dalam kontestasi politik kedepan. Disamping itu, berafiliasi dengan partai membantu kondisi internal DMC secara ekonomi ataupun logistik, khususnya dalam merubah paradigma masyarakat melalui program-programnya yang memakan cukup banyak biaya.

Tantangan dalam merubah persepsi masyarakat terkait DMC yang sekarang mengharuskan DMC untuk bertransformasi menjadi ormas yang lebih humanis serta politis. Selaras dengan itu, Brian menjelaskan mekanisme afektif terjadi karena munculnya tantangan untuk setiap peristiwa dan menemukan kendala yang memungkinkan serta teknik hubungan seperti apa yang sesuai dengan peristiwa yang khas. Hal ini memungkinkan kemunculan politik partisipatoris yang tumbuh lebih padat dan berjejaring secara luas (Brian,2015;70-78). Kendala yang dihadapi DMC di era kontemporer dalam merekonstruksi paradigma masyarakat terkait eksistensinya (premanisme), dapat diselesaikan melalui logika politik dengan cara menumbuhkan politik partisipatoris, hal ini tidak mungkin terjadi tanpa afeksi

politik yang dibangun oleh para pimpinan. Oleh karena itu, transformasi DMC menjadi penting untuk dilakukan karena posisinya yang semakin politis, baik di tingkat mikro (afeksi politik) maupun di tingkat basis (abangan). Karena itu DMC tidak bisa lagi seperti sebelumnya yang tampak secara vulgar sebagai organisasi preman. Aktivitas premanisme yang sebelumnya melekat sebagai citra atau imaji kuat masyarakat tentang DMC, kini menjadi suatu aktivitas yang tidak lagi ditonjolkan secara formal karena kesadaran pentingnya citra politik yang harus dibangun.

- c. Wacana kegiatan Sosial-Kemasyarakatan sebagai *nodal point*: Konstruksi kesadaran agen (DMC).

Tujuan kegiatan bakti sosial seperti Donor darah, aktivitas sholat dan Rescue R-DMC ini berdasarkan yang tertera pada Peraturan Organisasi NO: 05/PO/DMC/II/2023, Pasal 9 yakni:

“Mengadakan kegiatan di bidang Sosial, Budaya dan Lingkungan Hidup bagi anggota ataupun melibatkan masyarakat, serta Melakukan upaya pertolongan dan aksi sosial apabila terjadi bencana alam”

Selain itu, hal ini merupakan upaya untuk merubah paradigma masyarakat berdasarkan historisitas DMC yang hanya dianggap perkumpulan preman. Seperti apa yang dipaparkan Giyatno, bahwa stigma terhadap DMC ini memang sudah ada sejak pendiriannya, oleh karena itu perlu bagi organisasi untuk menunjukkan kontribusi sosialnya.

“Berkaca kepada pengalaman atau sejarah, DMC memang distigma seperti itu. Ya harus kami terima. Tapi kami harus bisa menunjukkan kontribusi sosial kami. Dari masyarakat kembali kepada masyarakat. Kami berdiri untuk kegiatan sosial.” (Giyatno, 2021).

Pembangunan organisasi DMC melalui kegiatan sosial selaras dengan Christian dalam buku *“Main Hakim Sendiri dan Militansi Islam Populis di Indonesia”* (2019), bahwa upaya ini merupakan produksi citra serta menanamkan rasa pentingnya kegiatan sosial-kemanusiaan kepada anggota bahwa apa yang mereka lakukan mulia dan bernilai (Wilson,2019; 1-6). Produksi citra dengan

aktivitas sosial dan keagamaan akan mendorong pembesaran organisasi DMC dengan merekonstruksi paradigma masyarakat mengenai eksistensi DMC yang sekarang. Mobilisasi massa melalui agenda sosial DMC selaras dengan yang Laclau katakan soal pembentukan identitas pada strategi populisme, bahwa ketika mobilisasi politik telah mencapai tingkat yang lebih tinggi yakni penyatuan (*unifikasi*) dari berbagai tuntutan secara ekuivalen, terbentuknya solidaritas, dan sistem penandaan (Laclau, 2005;72-74).

Ketika penamaan melalui titik tertentu memperoleh sentralitas (*nodal point*), maka berpengaruh (*effect*) pada berubahnya tuntutan demokratis menjadi tuntutan 'populer' (Laclau,2005;118-120). Wacana organisasi “sosial-kemasyarakatan” merupakan point sentrak (*Nodal Point*) yang menjadi strategi untuk merekonstruksi paradigma masyarakat sekaligus kesadaran agen (DMC) melalui praktik-praktik sosial-humanis. Walaupun DMC yang sekarang seakan sudah kehilangan tuntutan objektifnya (seperti pada awal pendiriannya), yakni menyediakan pekerjaan yang layak bagi anggotanya, namun perubahan dalam mewacanakan tujuan berorganisasi menjadi penting agar DMC tetap eksis dan diterima oleh publik.

5. Periode Sosial-Politik.

- a. Gerakan sosial dan afiliasi politik DMC dalam pembentukan Rantai Kesetaraan (*Chain of Equivalence*).

Seperti yang sudah dipaparkan diatas bahwa DMC merupakan wadah yang dibentuk untuk menyediakan pekerjaan bagi para anggota sebagai dampak dari kondisi struktural (ketimpangan sosial-ekonomi) sebagai keadaan *objektif* masyarakat Surakarta pasca Reformasi. Namun terdapat heterogenitas tuntutan antara anggota dan para pimpinan (*logic of difference*), hal ini karena perbedaan latar belakang kelas sosial mereka (subjek), yang tergabung di DMC. Seperti pendapat Laclau (2005), bahwa populisme meniscayakan ‘tiap tuntutan individu secara konstitutif terbagi: pada satu sisi, tuntutan individu tersebut memiliki sifat partikular pada dirinya sendiri; pada sisi lain, ia terpaut, melalui hubungan ekuivalensial, dengan totalitas dari tuntutan-tuntutan yang lain. Didukung oleh

Mouffe, bahwa cara untuk mempertahankan perbedaan mensyaratkan adanya konsepsi tentang agen sosial yang terkonstruksi berdasarkan basis sosial dimana agen tersebut berada (Mouffe,2018;78).

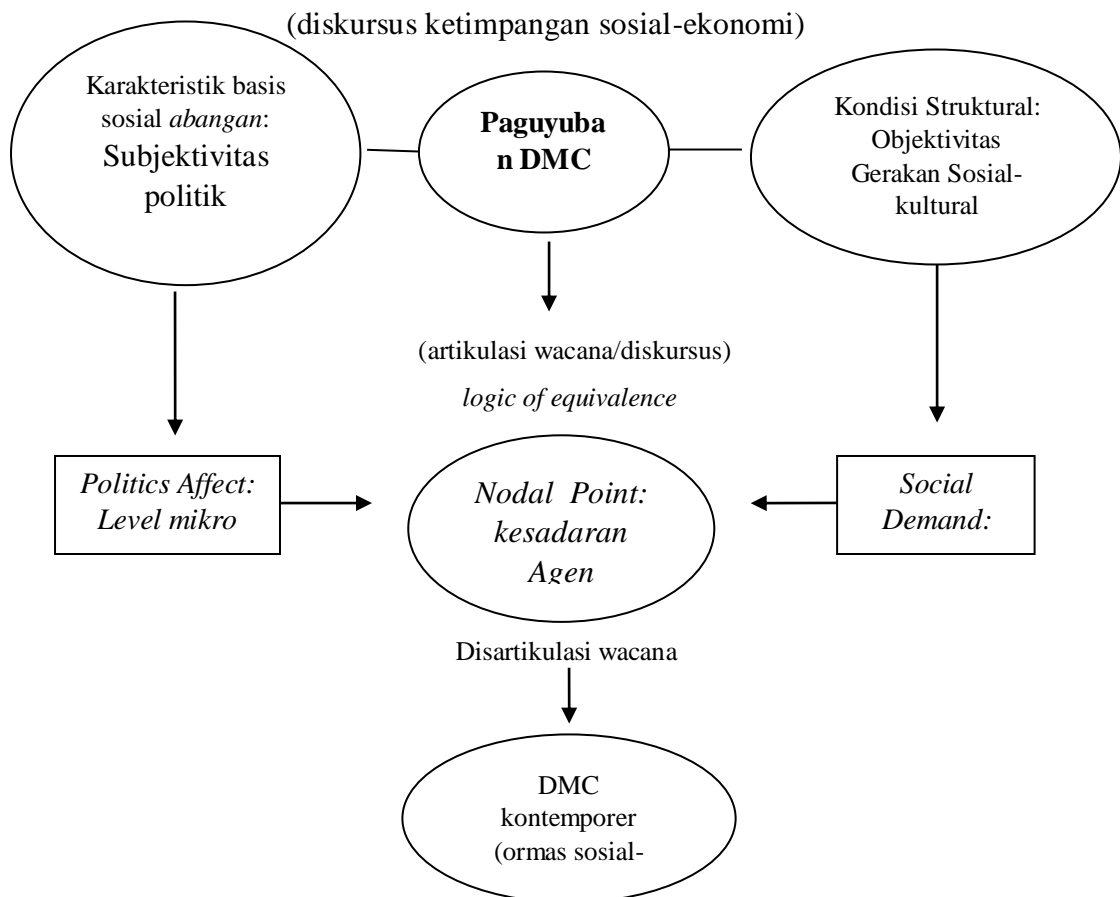
DMC sebagai agen sosial yang awalnya berkarakter ‘preman’ hingga menjadi ormas memiliki peran penting dalam *mengartikulasikan* tuntutan kelas sosial yang berbeda dalam tuntutan sosial (*social demand*), dalam hal ini menjadi sebuah penanda besar (*master signifier*). Di satu sisi para pemrakarsa yang berstatus sosial kelas menengah (secara ekonomi) memiliki dorongan untuk memulai karir di dunia politik seperti Denciz dan Giyatno, dan di sisi yang lain, kebutuhan akan pekerjaan menjadi tuntutan para anggota dari kelas bawah. Namun, DMC kontemporer yang menekankan aktivitas sosial-kemasyarakatan sebagai tujuan besar sebuah organisasi kemasyarakatan (ormas) merubah segala praktik-praktik sosial-kulturalnya. Disinilah terjadi proses reartikulasi wacana dari ormas yang mewadahi kelompok pencari kerja menjadi ormas yang bergerak di bidang sosial-kemasyarakatan.

Selain itu dalam dinamika DMC kontemporer, apa yang menjadi tuntutan ‘objektif’ kelas menengah maupun kelas bawah seakan-akan hilang karena konstruksi logika ‘sosial-kemasyarakatan’ yang dibangun diantara para anggota. Tuntutan ini menjadi point sentral (*nodal point*) bagi runtuhnya heterogenitas tuntutan-tuntutan yang lain. Selaras dengan itu, menurut Mouffe (2018) bahwa kesadaran agen sosial *bukan* merupakan ekspresi langsung dari kondisi ‘objektif’-nya, melainkan terbentuk secara diskursif. Artinya jika pada awal berdirinya DMC dalam konteks wacana ketimpangan sosial-ekonomi di ranah masyarakat premanis mengkonstruksi karakter “DMC” sebagai agen, maka akibat transformasinya menjadi jelas bahwa subjektivitas politik akan dibentuk dalam berbagai diskursif politik yang saling berkompetisi seperti berafiliasinya DMC dengan Partai PDIP karena kesamaan karakteristik basis massanya (abangan). Dalam konteks ini ‘partai’ menjadi ranah dalam membentuk subjektivitas politik bagi para pimpinan DMC.

Seperti yang Mouffe bilang bahwa partai akan memberikan penanda simbolik yang memungkinkan orang untuk menempatkan diri mereka dalam dunia sosial

dan memberi makna pada pengalaman hidup mereka (Mouffe,2018;68). Gerakan sosial-kultural DMC kontemporer seperti majelis sholawat, donor darah masal, pembentukan tim kebencanaan, dsb merupakan “modal simbolik” sekaligus penanda besar (*master signifier*) dalam mereproduksi ‘identitas’ DMC sekaligus sebagai hasil diskursif politik yang menjadi sarana dalam merebut *common sense*. Karena sekedar konstruksi politik diskursif, maka strategi ini menghendaki munculnya ‘tuntutan’ kolektif yang dibentuk melalui rantai ekuivalensi yang kemudian direduksi menjadi suatu kesatuan (Mouffe,2018;75-76).

Bagan 1. Transformasi DMC Awesome sebagai Mata Rantai Ekuivalensi (*Chain of equivalence*)



Mengutip Laclau dalam *Post-Marxist Theory* (2005) bahwa gagasan Lacanian tentang yang tidak dapat disimbolkan menjelaskan batas-batas pembentukan identitas. Realitas Lacanian memastikan bahwa tidak ada blok

hegemonik yang sepenuhnya menyadari identitas yang dipaksakan. Subjek tetap terpecah dalam kasus tersebut karena sifat antagonisme kelompok sosial (kelas) dan dislokasi dari struktur sosial (Philip, 2005;56). Dalam konteks DMC, karakteristik basis sosial dan afeksi yang dibangun secara tradisional oleh pemimpin membuat individu seakan-akan kehilangan ‘tuntutan’ objektifnya, yakni ekonomi (pekerjaan) seperti pada cita-cita awal pembentukan DMC, identitas DMC hanya disadari sebagai wadah ‘sosial-kemasyarakatan’. Hal ini berbeda dengan afeksi kelas menengah yang menyadari (sebagai subjek) identitas DMC sebagai alat dalam melegitimasi karir politiknya. DMC kontemporer sebagai wadah ‘sosial-kemasyarakatan’, dalam cara pandang Laclau merupakan penanda kosong (*empty signifier*) karena mengkaburkan perbedaan-perbedaan tuntutan objektif kelas pada subjek (*logic of equivalent*). Selain itu pentingnya identitas sebagai simbolisasi dari suatu tatanan penanda yang kosong (*Empty Signifier*), dan berfungsi sebagai perwakilan secara konseptual dari berbagai macam afektif (Laclau,2005: 69-71).

b. Formasi Wacana Gerakan Sosial-Politik “DMC” dan peluang membangun *Hegemoni*.

Sudah dijelaskan diatas bahwa pembangunan karakter ‘sosial-humanis’ adalah *nodal point* (poin sentral) bagi transformasi “identitas” DMC, hal ini menjadi peluang bagi DMC dalam membangun formasi hegemoni baru dalam praktik-praktik sosialnya. Seperti apa yang Mouffe (2018) katakan bahwa tujuan dari perjuangan hegemonik adalah mendisartikulasikan praktik-praktik yang sebelumnya hegemonik, mentransformasikannya dengan cara memperbaiki praktik-praktiknya dengan cara baru sebagai titik sentral (*nodal point*) dari formasi sosial hegemonik baru. Proses ini berguna dalam men-reartikulasikan penanda-penanda hegemonik dengan mode institusionalisasi (Mouffe,2018;53). Sebagai ormas berkarakter sosial-kemasyarakatan, eksistensi DMC bisa dikatakan sedang membangun formasi hegemoninya melalui domain politik, kultural dan institusional (formal) sebagai sebuah ormas. Selaras dengan itu upaya hegemoni menurut Laclau adalah ketika suatu subjek partikular berusaha mewakilkan

(merepresentasikan) partikularitas yang lain. Wacana akan dikatakan hegemonik jika satu atau lebih partikularitasnya mampu mengartikulasikan identitas atau kepentingan kelompok lain (*liyan*) (Theofillus,2017). Reartikulasi wacana tentang eksistensi DMC berdasarkan realitas masyarakat kontemporer mampu diwujudkan pimpinan DMC melalui gerakan sosial kemasyarakatan dan afiliasi politiknya. Disinilah letak peran kepemimpinan kharismatik Denciz dan Giyatno, dimana mereka mampu menciptakan organisasi kemasyarakatan (ormas) dalam angan-angan sosial masyarakat tanpa melepaskan signifikansi peran partai PDIP sebagai penanda simbolik (DMC kontemporer).

Selain dari peranan pemimpin kharismatik seperti yang sudah dipaparkan di subbab sebelumnya, proses terbentuknya identitas secara afeksi menurut Mouffe (2018) adalah hasil dari praktik dimana diskursif dan afeksi massa diartikulasikan, sehingga akan membentuk identifikasi tertentu (Mouffe, 2018;90). Dalam konteks ini masyarakat di wilayah yang menjadi basis DMC yakni di Solo Utara yang menjadi area artikulasi praktik-praktik DMC dalam setiap agenda sosial-kulturalnya. Disamping itu, praktik artikulasi ini secara politis akan menjadi motor penggerak (instrumen) dalam setiap aksi-aksi politik. Artinya, DMC mampu menggunakan strategi populisme selain dalam domain politik juga “kultural” melalui agenda sosial-kemasyarakatannya, sebagai usaha yang berpotensi untuk merebut *common sense* dan peluang dalam memenangkan *war of position* dalam setiap agenda politik di wilayah basisnya. Duduknya para pimpinan DMC di struktural PDIP menjadi pertanda bahwa dalam ‘ranah’ kepartaian pun, orang-orang yang tersimbolisasi sebagai anggota DMC mampu menduduki tempat-tempat penting dalam partai bahkan menjadi anggota legislatif. Oleh karena itu, kedepannya gerakan politik *populisme* ormas DMC (secara diskursif) dapat menjadi patokan (barometer) dalam melakukan analisis terhadap dinamika politik di Kota Surakarta beserta pluralitas yang mewarnainya.

D. PENUTUP

Dengan menggunakan teori populisme Ernesto Laclau dan Chantal Mouffe sebagai pisau analisis diskursif politik dalam melihat dinamika transformasi organisasi DMC sejak awal kemunculannya sampai sekarang, peneliti

membaginya dalam beberapa sub analisis. Pertama, Reformasi dan Momen Populis dimana kemunculan DMC merupakan efek ketimpangan ekonomi dan kondisi struktur sosial pasca reformasi, sehingga memunculkan kelompok-kelompok jalanan (vigilantisme) dan premanisme. Kemunculan DMC sebagai “gerakan sosial” pada ‘momen populis’ ini membawa beberapa elemen-elemen penting dalam bentuk organisatoris melalui mobilisasi massa hingga implikasinya di masyarakat Solo Utara yang diidentifikasi sebagai basis ‘premanisme’. Kedua, DMC sebagai fenomena gerakan populisme yang diidentifikasi melalui beberapa faktor, seperti karakteristik basis sosial “preman” yang akan menjawab ‘who is populism?’ itu sendiri. Lalu social demand (tuntutan sosial) untuk melihat kesatuan dalam bentuk wadah ‘DMC’ sebagai artikulasi tuntutan kolektif massa yang dalam konteks ini adalah tuntutan atas pekerjaan.

Ketiga, menjawab Gerakan populisme DMC sebagai diskursif politik, penulis menyebutkan pertama, strategi membangun relasi sosial sebagai modal. Teori modal sosial (social capital) Pierre Bourdieu digunakan untuk melihat terbentuknya DMC yang merupakan hasil relasi dan konsolidasi antara kelas menengah (pendiri DMC) dengan tokoh lokal setempat, bahkan anggota partai politik. Selain itu modal ekonomi dalam bentuk jasa parkir dan keamanan juga merupakan ‘modal’ awal DMC untuk meningkatkan legitimasinya di awal kemunculannya. Selanjutnya pada periode transformatif perubahan mulai nampak dari beralihnya mobilisasi modal (dari sosial-ekonomi menjadi kultural dan simbolik) merupakan tanda terjadinya proses transformasi secara “karakteristik” ormas DMC. Organisasi DMC yang dulunya hanya dianggap sekedar organisasi berkarakter “preman”, sekarang sudah bertransformasi menjadi organisasi berkarakter “sosial-humanis” melalui kegiatan sosialnya. Teori modal Bourdie telah menjelaskan proses transformasi ‘identitas’ DMC secara sosio-kultural.

Strategi selanjutnya adalah membangun afiliasi politik, yang dalam konteks ini antara DMC dan PDIP berdasarkan faktor kesamaan karakteristik basis massa dan afeksi politik (Brian Massumi) yang terbangun diantara pimpinan maupun anggota. Lalu strategi institusionalisasi ormas DMC yang menekankan peran kepemimpinan (tradisional, kharismatik, legal rasional) dalam merubah

paradigma anggota dan masyarakat umumnya, serta secara khusus meningkatkan daya tawar DMC untuk kemudian dapat berafiliasi dengan PDIP. Kemudian agenda sosial dan keagamaan sebagai usaha produksi citra untuk meningkatkan afeksi di antara anggota dan mendekonstruksi paradigma masyarakat mengenai eksistensi DMC yang sekarang.

Keempat, melihat karakteristik gerakan sosial DMC akibat dari ‘populisme’ sebagai diskursif politik yakni sebuah fenomena gerakan kelas menengah (middle class movement) secara asimetris (kelas menengah ekonomi menjadi kelas menengah politik). DMC yang merupakan hasil relasi ekuivalensi antara afeksi politik kelas menengah dan tuntutan pekerjaan yang dihubungkan dengan kondisi sosio-kultural (preman) menjadi suatu identitas. Yang Kelima, adalah implikasi gerakan populisme DMC kepada individu (anggota dan pimpinan), bagi organisasi, dan bagi masyarakat.

Keenam, DMC sebagai gerakan politik yang ditinjau menggunakan karakteristik kelompok “lumpen proletariat” yang memiliki orientasi politik yang khas pada masyarakat perkotaan, serta melihatnya dalam paradigma teori gerakan sosial dimana terjadinya praktik-praktik DMC (sosial-politis) sebagai pembentukan dan penyebaran common sense yang dapat menentukan definisi tentang realitas masyarakat di Solo utara. Disini secara sosio-kultural maupun politis, DMC memiliki peluang membangun hegemoninya.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. “Sejarah Surakarta” di https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Sejarah_Surakarta#cite_note-7 P2k.Stekom.ac.id pada Jumat (23/06/2023), pukul 15.34 WIB.
- Bourdieu, Pierre. (1977). *Outline Of A Theory Of Practice*. United States of America: Cambridge University Press, New York.
- Faisal. (2019). “Inilah Susunan Pengurus DPD PDIP Jawa Tengah Periode 2019-2024 Hasil Konferda” di <https://www.google.com/amp/s/jateng.tribunnews.com/amp/2019/07/16/inilah-susunan-pengurus-dpd-pdip-jawa-tengahperiode-2019-2024-hasil-konferda> diakses 10 Oktober 2022, Pukul: 16.30 WIB.
- Geertz, Clifford. (1983). *Local Knowledge*. New York: Basic Book.
- Goldstein, Philip. (2005). *Post Marxist Theory: An Introduction*. New York, USA: State University Of New York Press.

- Howarth, David, Aletta J. Norval, Yannis Stavrakakis. *Discourse Theory and Political Analysis: Identities, Hegemony, and Social Change*. UK: Manchester University Press.
- <https://tiyoe.wordpress.com/2009/05/24/solo-portai-besi-dan-malam-paling-sunyi-kerusuhan-mei-1998-di-solo/>
- Kurniawan. (2021). "Hapus Stigma Kelompok Preman, 120-An Anggota DMC Awesome Soloraya Sumbangkan Darah" selengkapnya di sini: <https://www.solopos.com/hapus-stigma-kelompok-preman-120-an-anggota-dmc-awesome-soloraya-sumbangkan-darah-1111052>. diakses 10 Oktober 2022, Pukul: 20.00 WIB.
- Kurniawan. (2021). "Musyawarah Anak Cabang PDIP Solo Munculkan Sosok Baru, Siapa Saja?" di <https://www.solopos.com/musyawarah-anak-cabang-pdip-solo-munculkan-sosok-baru-siapa-saja-1100729/amp> diakses 10 Oktober 2022, Pukul: 17.00 WIB.
- Laclau, Ernesto. (2005). *On Populist Reason*. London: Verso.
- Massumi, Brian. (2015). *Politics Of Affect*. Cambridge, UK: Polity Press
- Mouffe, Chantal. (2020). *Populisme Kiri*. Yogyakarta: Antinomi.
- Mughis M, Abdil. (2018). *Siapakah Lumpen-proletariat? Sebuah Diskusi Konseptual* di <https://indoprogress.com/2018/02/siapakah-lumpen-proletariat-sebuah-diskusi-konseptual/#:~:text=Lumpen%2Dproletariat%20adalah%20kategori%20keagamaan,rakyat%20miskin%20dengan%20lumpen%2Dproletariat>.
- Setianto, Yudi. (2022). "Transformasi Golongan Abangan Menuju Gerakan Radikal Keagamaan (Dinamika Radikalisme Islam dalam Masyarakat Abangan di Solo, Jawa Tengah)". *Jurnal Sosiologi Agama*, Vol.16(2), hlm; 219-232.
- Setiyowati, Rini. (2008). *Jaringan Komunikasi Partisipan Kelompok Gondhez's (Studi Jaringan Komunikasi Partisipan Kelompok Gondhez's di Kota Solo dalam Mensukseskan Pasangan Bibit-Rustri pada Pemilihan Gubernur Jawa Tengah 2008)*. Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- Surya, Aldwin. (2006). *Pembentukan Kelas Menengah Kota: Peran Dan Implikasi Keberadaannya Terhadap Percepatan Pembangunan*. *Jurnal Industri dan Perkotaan*, Volume 9(18), hlm: 1166-1186).
- Suryadinata, Theofilus. A. (2017). *Artikulasi Politik Kewarganegaraan Dalam Gerakan Keadilan Lingkungan Di Kalimantan Tengah*. Tesis. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.
- Ummah Mustofa, Mubtasyirotul. (2019). *Tinjauan Kritis Populisme Di Indonesia: Antara Gagasan Atau Cara Baru Sirkulasi Elit?*. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, Vol.3, No.1, Hal: 70-84.
- Wilson, Ian. (2019). *Main Hakim Sendiri dan Militansi Islam Populis di Indonesia: Studi Kasus Front Pembela Islam (FPI)*. *indoprogress*.
- Winayanti, Nia K. (2011). *Dasar Hukum Pendirian dan Pembubaran ORMAS (Organisasi Kemasyarakatan)*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.